



Kalau itu memang diperlukan, kami akan periksa walikota Pontianak, Sutarmidji.

Didik Istiyanta
Assisten Pidana Khusus
Kejaksaan Tinggi Kalbar

Kejati Terus Bidik Koruptor

Baru Terungkap 4,8 M Proposal Fiktif Bansos

PONTIANAK- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memeriksa mantan anggota Dewan Kota Pontianak terduga korupsi bantuan sosial (bansos) Kota Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008. Pemeriksaan berbagai pihak terkait, terus dilakukan lembaga yudikatif ini, setelah kemarin menetapkan Buchary



SHANDO SAFELAI/PONTIANAK POST

DIPERIKSA: Toton Triadi dipanggil sebagai saksi kasus penyimpangan dana bansos Kota Pontianak 2006-2008.

DIPERIKSA KEJATI KALBAR

- 1 Buchary A Rahman, mantan Walikota Pontianak (Tersangka)
- 2 Hasan Rusbini, mantan Sekda Kota Pontianak (Tersangka)
- 3 Gusti Hersan Aslirosa, mantan Ketua DPRD Kota Pontianak (Saksi)
- 4 Eka Kurniawan, mantan wakil Ketua DPRD Kota Pontianak (Saksi)
- 5 Rudy Enggano Kenang, pejabat aktif BPKAD Kota Pontianak (Saksi)
- 6 Toton Triadi, mantan anggota DPRD Kota Pontianak (Saksi)

A Rahman, Walikota Pontianak periode 2003-2008 dan bekas Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini sebagai tersangka. Kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



Kejati Terus Bidik Koruptor

Sambungan dari halaman 1

dewan sekaligus tokoh organisasi kepemudaan," kata Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Didik Istiyanta kepada Pontianak Post, kemarin (21/2).

Dikatakan Didik, pemeriksaan terhadap Toton ini berkaitan dengan aliran dana bansos tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008. "Ini masih ada kaitannya dengan Bansos. Mengenai apa saja materi pemeriksaan, silahkan Tanya penyidik," katanya.

Didik mengungkapkan, dua hari penggeledahan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, pihaknya telah menemukan aliran dana dari proposal fiktif sebesar Rp4,8 milyar. "Sementara ini

baru 4,8 milyar rupiah yang kami temukan. Ini dari sekian banyak kardus arsip yang kami sita dari kantor BPKAD Kota Pontianak kemarin," lanjutnya.

Menurut Didik, pemeriksaan terhadap berkas atau arsip itu belum sepenuhnya dilakukan. Menurutnya, ada ribuan proposal yang harus dilakukan pemeriksaan. "Ada banyak sekali proposal yang kita sita. Dari sebanyak itu, tentunya tidak semuanya fiktif, ada juga yang benar. Nah itu yang harus kami periksa satu persatu," terangnya.

Dalam pemeriksaan aliran dana bansos ini, ia tidak sepenuhnya mengacu pada laporan hasil pertanggungjawaban dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI perwakilan Kalbar yang diserahkan ke

Walikota Pontianak tahun 2009 lalu. "Versi BPK berbeda dengan versi kita. Kalau BPK berdasarkan atas laporan hasil pertanggungjawaban, atau legal formal. Tetapi kalau kejaksaan harus melakukan verifikasi atau pengecekan kembali, apakah benar dana bansos itu sesuai dengan perhitungannya. Meskipun itu belum dibuat laporan pertanggungjawabannya," katanya.

Didik juga akan memeriksa Walikota Pontianak, Sutardi jika memang itu diperlukan. "Kalau itu memang diperlukan, kami akan periksa Walikota Pontianak, Sutardi," tegasnya.

Sementara itu, Toton Triadi enggan berkomentar atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya. ia berlalu

begitu saja saat awak media mencoba mewawarcainya. "Saya no comment ya," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah menetapkan Buchary A Rahman, Walikota Pontianak periode 2003-2008 dan bekas Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2008.

Kejati juga memeriksa tiga orang lainnya yakni, Gusti Hersan Aslirosa, mantan Ketua DPRD Kota Pontianak, Eka Kurniawan, mantan wakil Ketua DPRD Kota Pontianak dan seorang pejabat aktif dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, Rudy Engano Kenang. (arf)